

SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PADA PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BELOPA

YUNIAR, ELPIYANI MONGGOL, WILDA NUR MUFLIHA

Akademik Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Ibnu Khaldun Palopo
e-mail: yuniar.nurleli@gmail.com , yanielpiyani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaporan keuangan pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Belopa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi dan wawancara. Subjek penelitian ini berjumlah 30 orang yang merupakan perangkat desa di Desa Senga Selatan, Desa Kurrusumanga, Desa Pasamai, dan Desa Balubu yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa atau Kaur Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dilakukan menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan berperan dalam pengelolaan keuangan dana desa dengan menjalankan tugasnya masing-masing sesuai tanggungjawab melalui salah satu proses yaitu pelaporan. Meskipun dalam penatausahaan belum sepenuhnya berperan yang seharusnya dilakukan oleh bendahara desa atau kaur keuangan namun masih diambil alih oleh Sekretaris desa. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman terhadap teknologi.

Kata Kunci: Sistem Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to determine how the financial reporting system is in managing village funds in Belopa District. The data collection techniques used in this study are observation and interview techniques. The subjects of this study were 30 people who were village officials in Senga Selatan Village, Kurrusumanga Village, Pasamai Village, and Balubu Village, namely the Village Head, Village Secretary, and Village Treasurer or Village Finance Officer. This study uses a qualitative approach method. The results of this study indicate that the financial reporting system plays a role in managing village fund finances by carrying out their respective duties according to their responsibilities through one of the processes, namely reporting. Although in administration it has not fully played a role that should be carried out by the village treasurer or finance officer, it is still taken over by the Village Secretary. This is due to the lack of understanding of technology.

Keywords: Financial Loan System, Village Fund Management

PENDAHULUAN

Desa merupakan golongan masyarakat yang terikat pada suatu tempat tinggal dan untuk memenuhi keperluan hidup penduduk desa yang tergantung pada hasil pertanian. Desa memiliki dua potensi yaitu potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam meliputi tanah, perairan, cuaca, tumbuhan dan hewan serta potensi yang melibatkan masyarakat desa, aparatur desa, lembaga-lembaga desa yang mampu mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut sehingga bermanfaat bagi daerah lain maupun bagi kota-kota sekitarnya. Desa juga memiliki fungsi diantaranya sebagai pemasok kebutuhan bagi yang ada di kota. Desa sebagai mitra dalam pembenahan kota serta desa sebagai pemerintahan yang terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hambatan-hambatan pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan adalah kurang kontrol dan mengelola Alokasi Dana Desa yang tidak berimbang antara pendapatan dan pengeluaran, maka perlu adanya peraturan yang tegas dan konsisten mengenai perencanaan

biaya yang telah dikelola oleh perangkat desa. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan alat mengkoordinasikan aktivitas perolehan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, serta menjadi dasar belanja dan pengeluaran pembiayaan bagi pemerintah desa untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya APBD ditetapkan menjadi peraturan desa, maka aktivitas pelaksanaan anggaran segera dilaksanakan.

Untuk melihat apakah laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintah maka melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pengelolaan keuangan daerah belum optimal (<https://swa.co.id/sri-mulyani,2017>). Agar Naik Kelas, Sri Mulyani Minta Aparat Desa Kelola Anggaran dengan Baik (<https://liputan6.com>). Perketat pengawasan pengelolaan dana desa (<https://kompas.com.2017>).

Agar semua pelaksana keuangan daerah mampu mengelola keuangan harus memahami sistem pengelolaan, oleh sebab itu pemahaman pengelola keuangan mengenai sistem pengelolaan keuangan desa merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Faktor yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat antara lain akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Widiastuti (2017), tentang kesejahteraan masyarakat menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Peneliti Indrawan (2017) menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat menghasilkan temuan yang berbeda atau adanya GAP hasil penelitian. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh sri widiastuti (2017), bahwa terdapat pengaruh signifikan antara akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (X1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Indrawan (2017), bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kebijakan desa (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2018), akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Peneliti Andi Harianto (2018), kebijakan desa (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Penelitian sebelumnya dilakukan di desa kambo, kecamatan mungka, kota palopo. Sedangkan penelitian ini dilakukan di kecamatan belopa, kabupaten luwu.

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas beberapa kelurahan dan desa – desa. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kecamatan merupakan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat.

Berdasarkan fenomena dan adanya perbedaan hasil penelitian (GAP) yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Sistem Pelaporan Keuangan pada Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Belopa .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey. Sama halnya dengan penelitian survey pada umumnya, jenis penelitian yang digunakan yaitu data primer yang langsung mengarah pada

Copyright (c) 2024 EDUTECH : Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi

informasi yang diperoleh dari tangan pertama, yaitu desa – desa yang berada di Kecamatan Belopa, diantaranya Desa Senga Selatan, Desa Kurrusumanga, Desa Pasamai, dan Desa Balubu. Data primer yang dibutuhkan merupakan data yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti (sistem pelaporan keuangan pada pengelolaan dana desa). Dalam penelitian ini data dapat diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh aparat – aparat desa kecamatan belopa. Sedangkan sumber data berasal dari skor total yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang telah diisi oleh responden.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi terdiri dari dua jenis yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah metode yang digunakan teknik yang sama, yaitu dengan teknik wawancara semi terstruktur untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditentukan (Sugiyono, 2017). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, sehingga akhirnya ditemukan data yang absah.

Analisis data adalah suatu proses yang pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan menyusun data ke dalam kategori, dijabarkan menjadi beberapa unit, memadukan, menyusun pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Hal ini memudahkan orang lain maupun diri sendiri untuk memahaminya. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu memperoleh, menganalisis data, kemudian menyempurnakan pola hubungan (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kecamatan Belopa merupakan salah satu kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Belopa resmi menjadi ibu kota Kabupaten Luwu pada tanggal 13 Februari 2006. Kecamatan Belopa terdiri dari lima kelurahan yaitu Kelurahan Belopa, Kelurahan Senga, Kelurahan Tampunia Radda, Kelurahan Tanamanai dan Kelurahan Balo-balo serta empat desa yaitu Desa Senga Selatan, Desa Kurrusumanga, Desa Pasamai, dan Desa Balubu. Namun peneliti hanya berfokus pada empat desa yang berada di kecamatan belopa.

1. Desa Senga Selatan

Desa Senga Selatan terbentuk pada tahun 1999 dan merupakan pemekaran dari desa Senga yang sekarang telah menjadi kelurahan senga. Desa Senga Selatan terdiri dari 6 (enam) dusun yaitu; Dusun Mangaliali, Dusun Labulawan, Dusun Kalobang, Dusun Tadette, Dusun Walenna Barat dan Dusun Walenna Timur.

Desa Senga Selatan terletak di wilayah dataran rendah dan memiliki luas 11,20 Km². Lahan desa ini terbagi atas persawahan, perkebunan dan fasilitas umum. Letak geografis desa Senga Selatan terbatas dengan wilayah:

Sebelah Utara	: Kelurahan Senga
Sebelah Timur	: Teluk Bone
Sebelah Selatan	: Desa Kasiwiang
Sebelah Barat	: Desa Pasamai

2. Desa Kurrusumanga

Desa Kurrusumanga terbentuk pada tahun 1966. Desa Kurrusumanga terdiri dari tiga dusun yaitu; Dusun Kurrusumanga, Dusun Padang-padang dan Dusun Kombong. Desa Kurrusumanga dikladifikasikan pada dataran sedang memiliki luas 342,87 ha. Secara umum

tipologi desa kurrusumanga terdiri dari perkebunan, persawahan, perdagangan dan perikanan. Secara geografis desa kurrusumanga berbatasan dengan wilayah diantaranya:

Sebelah Utara	: Desa Sampa Kecamatan Bajo
Sebelah Timur	: Desa Balubu
Sebelah Selatan	: Kelurahan Balo-balo
Sebelah Barat	: Desa Balla Kecamatan Bajo

3. Desa Balubu

Desa Balubu baru terbentuk beberapa tahun. Sebelum menjadi desa Balubu, desa ini bergabung dengan desa Kurrusumanga dan sebagai salah satu dusun dikurrusumanga. Desa Balubu terletak di wilayah dataran rendah atau landai dan memiliki luas 342,87 ha. Secara umum, tipologi desa Balubu terdiri dari perkebunan, persawahan dan peternakan.

4. Desa Pasamai

Pada tahun 1996 Pasamai menjadi desa persiapan yang sebelumnya Pasamai bergabung dengan desa Kurrusumanga. Kemudian pada tahun 2001 Desa Persiapan Pasamai resmi menjadi Desa Pasamai. Desa Pasamai terdiri dari tiga dusun yaitu; Dusun Pasamai, Dusun Lempmajang, dan Dusun To'Bulo.

Desa Pasamai terletak di wilayah dataran rendah atau landai dan memiliki luas 342,87 ha. Secara umum tipologi desa Pasamai terdiri dari perkebunan, persawahan, perdagangan, peternakan dan pertambangan. Secara geografis desa Pasamai berbatasan dengan wilayah diantaranya:

Sebelah Utara	: Kelurahan Balo-balo Kecamatan Belopa
Sebelah Timur	: Desa Cakkeawo Kecamatan Suli
Sebelah Selatan	: Desa Padang Lambe Kecamatan Suli
Sebelah Barat	: Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa

B. Hasil Penelitian

Tahapan Pelaporan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Belopa, sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kepala desa dan sekretaris desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati dalam bentuk Laporan semester pertama, berupa laporan realisasi APBDes dan laporan semester akhir tahun. Namun dalam penyampaiannya sebagai desa, kadang masih mengalami keterlambatan. Keterlambatan disebabkan kendala dalam kelengkapan dokumen. Hal ini didukung dari hasil wawancara, sebagai berikut:

“Pernah, terlambat karena pembuatan laporan pertanggungjawaban juga lambat”
(Wawancara Ibu D, Bendahara Kurrusumanga).

Informasi terkait pelaporan dana desa dapat dikatakan bahwa pemerintah desa masih perlu melakukan pembenahan agar semakin lebih baik.

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, sistem pelaporan keuangan pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Belopa menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan desa Kurrusumanga, Balubu, Pasamai, dan Senga Selatan telah bereperan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini didukung oleh teori keagenan, yaitu pengelolaan dana desa harus diawasi agar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tentunya dengan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah desa, maka informasi yang di terima masyarakat akan diimbangi dengan pemerintahan desa.

Tahap pelaporan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu kepada Bupati yang diwakilkan Kepala desa dan sekretaris desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati dalam bentuk laporan semester pertama, berupa laporan realisasi APBDes dan laporan semester akhir tahun, namun dalam penyampaiannya sebagian desa, kadang masih mengalami keterlambatan. Terakhir dalam bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap

masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan prinsip pengelolaan dana desa tercermin dari keterbukaan mengenai rincian dan realisasi APBDes yang diterima dengan adanya papa informasi tentang pelaksanaan pembangunan, forum musyawarah dan baliho APBDes. Hal ini didukung oleh teori legitimasi, yaitu organisasi harus secara berkelanjutan menunjukkan telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan nilai sosial. Hal ini sering dapat dicapai melalui pengungkapan dalam laporan perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan keuangan pada pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Belopa secara keseluruhan dapat dikatakan berperan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sistem pelaporan keuangan yang telah melaksanakan setiap tugas dalam pengelolaan dana desa salah satunya yaitu tahap pelaporan keuangan desa. Meskipun di sebagian besar desa yaitu desa kurrusumanga, balubu dan pasamai dalam penatausahaannya masih diperlukan pelatihan – pelatihan dan pada tahap pelaporan masih butuh pembenahan agar pelaporan realisasi APBDes lebih tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. D. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 41–43. Retrieved from <http://ojs.uho.ac.id/index.php/Jurnalakuntansikeuangan/article/view/2671> (Accessed February 26, 2020).
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 village law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183.
- Apriliani. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2013.
- Chabib, S. (2010). *Pengelolaan keuangan dan aset daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Fradiyanto, A. (2015). Akuntabilitas alokasi dana desa tahun 2014 dalam mewujudkan good governance (Studi kasus pada Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik). Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra.
- Husin, D. (2017). Flexibility of budget accountability using flow modification in the design of village financial accounting. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(1), 19–35.
- Khoirudin, M. D. (2017). Peran pemerintah dalam urusan pengelolaan dana desa (Studi di Kabupaten Malang dan Desa Landungsari). Skripsi.
- Mahmudi. (2010). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM-YKPN.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (Mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Anwar, M. R. (2020). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi kasus pada Desa Pati Kabupaten Pati).
- Loura, E. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Lasmi, Y., & Juita, V. (2020). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Amal, I. (2023). Analisis pengaruh APBDes, akuntabilitas pengelolaan keuangan, transparansi, kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.